

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**




**KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Tebing Tinggi menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Tebing Tinggi dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.


CAMAT TEBING TINGGI
NORSAMIDI, S.Kep
NIP.19720606 199202 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 ini disusun untuk menyajikan Laporan Capaian Indikator Kinerja dan Evaluasi atas Tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tebing Tinggi selama Tahun 2023.

Adapun Tujuan Strategis Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 setelah dilakukan penyusunan kembali Pohon Kinerja dan Cascading adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik, dengan indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Seksi pada Kecamatan Tebing Tinggi. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksud untuk Tahun 2023 adalah sebesar 79,53 dengan Rasio Capaian sebesar 90,23%. Tujuan Strategis adalah merupakan Perjanjian Kinerja SKPD dalam Hal ini Camat.

Untuk Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 yang juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial, realisasinya adalah sebesar 79,53 atau Rasio Capaian 90,23%.
- 2) Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif, realisasinya adalah 54 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau Rasio Capaian 45%.
- 3) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani, realisasinya adalah sebesar 100% atau Rasio Capaian 100%.


- 4) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan, realisasinya adalah sebesar 100% atau Rasio Capaian 100%.
- 5) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan, realisasinya adalah sebesar 100% atau Rasio Capaian 100%.

Untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, Kecamatan Tebing Tinggi melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran Kecamatan Tebing Tinggi pada Tahun 2023 berjumlah Rp. 4.110.367.000,00 yang meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.970.353.200,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 140.013.800,00 Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 3.704.109.752,00 atau sekitar 90.12% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.568.783.252,00 (89,89%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 135.326.500,00 (96,65%).

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 ini, selanjutnya dapat dijadikan sebagai :

- a. Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
- b. Penyempurnaan Dokumen Perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kecamatan Tebing Tinggi dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel.


CAMAT TEBING TINGGI
NORSAMIDI, S.Kep
NIP. 19720606 199202 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Tujuan | 2 |
| 1.4 Gambaran Umum SKPD | 3 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| 2.1. Perencanaan Kinerja | 9 |
| 2.1.1. Rencana Strategis (Renstra) | 9 |
| 2.1.2. Rencana Kerja (Renja) | 10 |
| 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 13 |
| 2.1.4. Perjanjian Kinerja (PK) | 16 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 18 |
| 3.1. Akuntabilitas Kinerja | 18 |
| 3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi | 18 |
| 3.1.2. Realisasi Anggaran | 26 |
| 3.1.3. Analisis Kinerja Lainnya | 28 |
| BAB IV PENUTUP | 31 |
| 4.1 Kesimpulan | 31 |
| 4.2 Upaya Perbaikan | 32 |
| LAMPIRAN | 33 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 1.1. Data Kepegawaian Kecamatan Tebing Tinggi..... | 7 |
| Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target | 10 |
| Tabel 2.2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 | 11 |
| Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 | 14 |
| Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD Tahun 2023 .. | 17 |
| Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja SKPD | 18 |
| Tabel 3.2. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat | 19 |
| Tabel 3.3. Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat..... | 20 |
| Tabel 3.4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | 21 |
| Tabel 3.5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 23 |
| Tabel 3.6. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | 27 |
| Tabel 3.7. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2022 | 29 |
| Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 | 31 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 1.1. Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan | 8 |
| Gambar 1.2. Peta Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan | 9 |
| Gambar 1.3. Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing Tinggi | 11 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ada beberapa regulasi yang mengatur kecamatan dalam menjalankan roda pemerintahannya, salah satunya yaitu Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Sebagai bentuk perpanjangan tangan tersebut, maka Kecamatan Tebing Tinggi menyusun Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Balangan sebagaimana tercantum pada RPJMD 2021-2026. Dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD tersebut, kecamatan Tebing Tinggi menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD selanjutnya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi yang juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD atau Camat.

Pertanggungjawaban atas Rencana Renja (Renja) inilah, Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3 Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023).
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 83).

1.3. Tujuan

Tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai :

1. Sarana Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi dalam melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, termasuk dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

2. Bahan Penilaian dan Sarana Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja, baik Kinerja Tujuan Strategis SKPD maupun Sasaran Strategis SKPD.
3. Bahan pengambilan keputusan, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam rangka Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana Kerja dan Hasil Kerja.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Kantor Camat Tebing Tinggi merupakan salah satu SOPD di Kabupaten Balangan, Kecamatan Tebing Tinggi secara legal formal mulai berdiri sejak terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan. Kecamatan Tebing Tinggi merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Awayan.

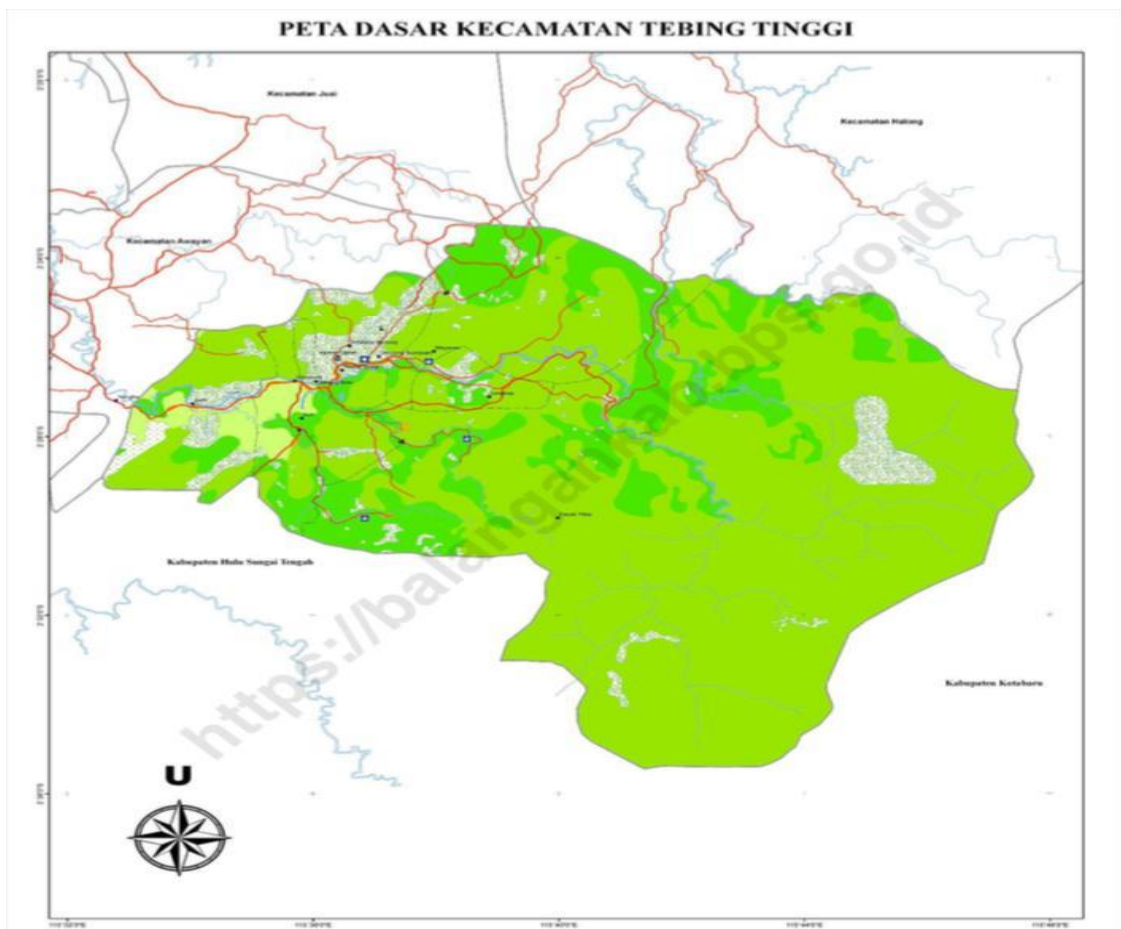


Gambar 1.1 Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten Balangan

Secara administrasi, Kecamatan Tebing Tinggi terdiri dari 12 desa yaitu Desa Dayak Pitap, Tebing Tinggi, Sungsum, Ju'uh, Mayanau, Simpang Bumbuan, Auh, Gunung Batu, Langkap, Simpang Nadong, Ajung dan Kambiyain. Daerah yang paling luas adalah desa Ajung mencapai 100,23 km², dan desa yang mempunyai luas terkecil yaitu

Desa Gunung Batu, dan Simpang Nadong yang masing-masing luasnya hanya 5 km² (Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006).

Kecamatan Tebing Tinggi berbatasan dengan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (sebelah utara), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan. Secara geografis, Kecamatan Tebing Tinggi terletak pada lingkup koordinat 02°01'37" sampai dengan 02°35'58" Lintang Selatan dan 114°50'24" sampai dengan 115°50'24" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi seluas 257,25 km² atau 14 persen dari luas wilayah Kabupaten Balangan.



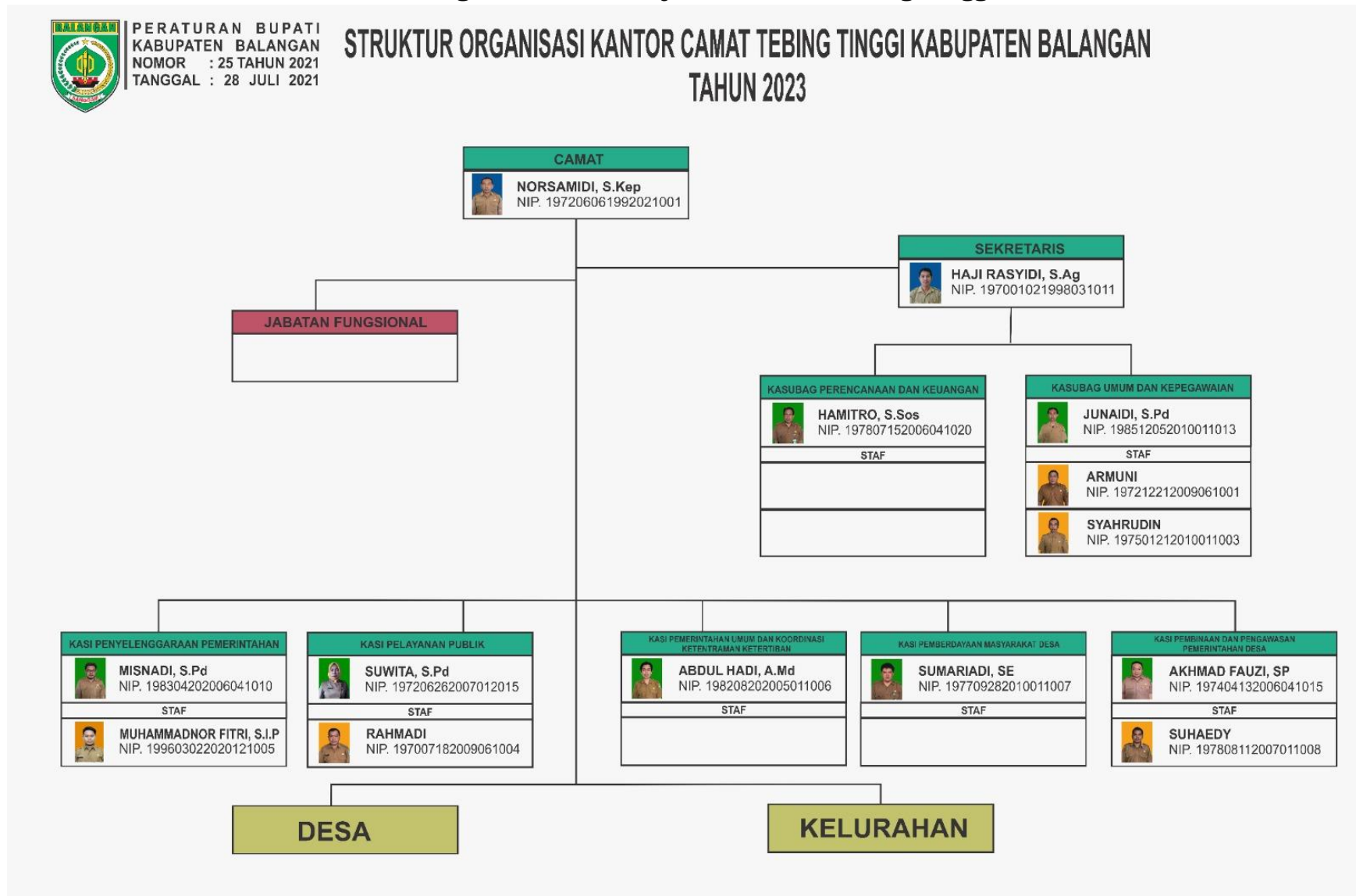
Gambar 1.2.
Peta Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan

Dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Tebing Tinggi yang dipimpin Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
6. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Di bawah ini adalah Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023.

Gambar 1.3.
Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing Tinggi



Data Kepegawaian pada Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Data Kepegawaian Kecamatan Tebing Tinggi

| SKPD | JLH (ORG) | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH (ORG) | PANGKAT | JLH (ORG) | GOL | JLH (ORG) |
|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------|-------------------|-----------|-------|-----------|
| Kantor Kecamatan Tebing Tinggi | 14 | SLTP | 1 | Juru Tk. I | 1 | I/d | 1 |
| | | SLTA | 1 | Pengatur Muda | 1 | II/a | 1 |
| | | SLTA | 1 | Pengatur Tk. I | 1 | II/d | 1 |
| | | SLTA | 1 | Penata Muda | 1 | III/a | 1 |
| | | S 1 | 1 | Penata Muda | 1 | III/a | 1 |
| | | D III | 1 | Penata Muda Tk. I | 1 | III/b | 1 |
| | | S 1 | 1 | Penata Muda Tk. I | 1 | III/b | 1 |
| | | S 1 | 2 | Penata | 2 | III/c | 2 |
| | | S 1 | 4 | Penata Tk. I | 4 | III/d | 4 |
| | | S 1 | 1 | Pembina | 1 | IV/a | 1 |

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Menjelaskan hal yang melatarbelakangi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

1.3 Tujuan

Menjelaskan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Menjelaskan Profil Kecamatan Tebing Tinggi baik dari Letak Geografis, Tugas Organisasi sesuai Regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintahannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi, berikut Target Kinerja yang harus dicapai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi, berikut Analisa Faktor Pendukung dan Penghambatnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menjelaskan tentang Kesimpulan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi.

4.2 Upaya Perbaikan

Menjelaskan tentang upaya yang akan dilaksanakan Organisasi untuk memperbaiki Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Tebing Tinggi mendukung pelaksanaan Misi IV yaitu Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan Kualitas Layanan Birokrasi Pemerintahan pada Kecamatan Tebing Tinggi.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik, dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang merupakan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Seluruh Seksi pada Kecamatan Tebing Tinggi.

Untuk mencapai Tujuan Strategis tersebut, maka ditentukan Sasaran Strategis Kecamatan Tebing Tinggi, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani.
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib

Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Di bawah ini disajikan Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Tebing Tinggi berikut Indikator dan Targetnya.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | - | - | 83 | 84 | 85 | 86 |
| | | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| | | Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.1.2. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023

| No | Kode | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun | |
|----|-----------------|---|--|--|---------------|
| | | | | Kinerja | Anggaran |
| 1 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD | 100 % | 3.427.564.600 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 100% | 90.552.500 |
| 1 | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 5 Dokumen | 7.223.000 |
| 2 | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 6.199.500 |
| 3 | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 77.130.000 |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | 100% | 2.581.418.600 |
| 4 | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan | 15 Orang/bulan | 2.530.718.600 |
| 5 | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 50.700.000 |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 20.000.000 |
| 6 | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 2 Paket | 20.000.000 |

| No | Kode | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun | |
|----|-----------------|--|--|--|-------------|
| | | | | Kinerja | Anggaran |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 284.040.300 |
| 7 | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Jumlah Paket Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 2.250.000 |
| 8 | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 5 Paket | 4.335.200 |
| 9 | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 1 Paket | 42.842.600 |
| 10 | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 1 Paket | 12.082.500 |
| 11 | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | 222.530.000 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 130.013.800 |
| 12 | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebeleur yang diadakan | 7 Buah | 55.604.800 |
| 12 | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | 3 unit | 74.409.000 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 174.288.600 |
| 13 | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 72.842.000 |
| 14 | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 30.400.000 |
| 15 | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 71.046.600 |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 147.250.800 |
| 16 | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan DInas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 15 Unit | 102.025.800 |
| 17 | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 10 Unit | 6.600.000 |
| 18 | 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 38.625.000 |

| No | Kode | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun | |
|----|-----------------|---|--|--|-------------|
| | | | | Kinerja | Anggaran |
| 2 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) | 100 % | 64.674.000 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100% | 64.674.000 |
| 19 | 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan | 12 Laporan | 64.674.000 |
| 3 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif | 100 % | 287.578.000 |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif | 100% | 195.674.500 |
| 20 | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan | 12 Laporan | 195.674.500 |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatana kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 20 Keluarga | 91.903.500 |
| 21 | 7.01.03.2.06.12 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan menuju Keluarga Berkualitas | 20 keluarga | 91.903.500 |
| 4 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 45.998.000 |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan | 12 Laporan | 45.998.000 |
| 22 | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan Intasi Vertikal diWilayah Kecamatan | 12 Laporan | 45.998.000 |

| No | Kode | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun | |
|---------------|-----------------|---|--|--|----------------------|
| | | | | Kinerja | Anggaran |
| 5 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan | 100 % | 135.080.200 |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 135.080.200 |
| 23 | 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokomen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 12 Dokumen | 135.080.200 |
| 6 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu | 100 % | 149.472.200 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 12 Desa | 149.472.200 |
| 24 | 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokomen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 24 Dokumen | 73.086.000 |
| 25 | 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokomen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 76.386.200 |
| Jumlah | | | | | 4.110.367.000 |
| | | | | | |

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi setelah dilakukannya Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading terbaru, adalah Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis SKPD. Berikut disampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026 yang dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan TEBING TINGGI Tahun 2023
Tujuan SKPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah
Kecamatan yang Baik

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial | <p>Makna Indikator : Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Tupoksinya</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan Tupoksinya</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang</p> | Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial | Hasil Kuisioner Penilaian |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---------------------------------------|
| | | | Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | | |
| 2 | Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif | <p>Makna Indikator : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang memiliki Susunan Kepengurusan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai sarana bagi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada seluruh Desa</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p> | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) |
| 3 | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | <p>Makna Indikator : Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------|---------------------|
| | | | <p>Sebagai Indikator bagi Seksi Ketentraman dan Keter-tiban Umum dalam menjaga Kondusi-fitas Wilayah Keca-matan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi dikali 100%</p> <p>Sumber/Refere nsi Indikator : Analisa Mandiri</p> | | |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggara an Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Tertib Administra-si Pemerin-tahan | <p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Ad-ministrasi Pemerin-tahan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pemerin-tahan dalam mem-berikan Pembinaan Administrasi Peme-rintahan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disam-</p> | Kepala Seksi Pemerintahan | Pemerint ah-an Desa |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|--------------------|
| | | | <p>paikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p> | | |
| 5 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan | <p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pembangunan dalam memberikan Pembiayaan Pengelolaan Keuangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 7 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p> | Kepala Seksi Pembangunan | Pemerintah-an Desa |

2.1.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, maka Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja (PK)
Kepala SKPD Tahun 2023

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|---|---|---------------|
| 01 | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial | 83 |
| 02 | Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif | 60 |
| 03 | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | 100% |
| 04 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan | 100% |
| 05 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan | 100% |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Selain Pertanggungjawaban Keuangan, maka Pertanggungjawaban Kinerja adalah sesuatu yang wajib untuk disampaikan oleh setiap SKPD kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Republik Indonesia melalui Bupati Balangan, dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pencapaian Kinerja berdasarkan Capaian Rata-Rata atas Indikator Kinerja dibagi menjadi empat kategori, yaitu :

Tabel 3.1.
Kategori Capaian Kinerja SKPD

| URUTAN | RENTANG CAPAIAN KINERJA | KATEGORI CAPAIAN KINERJA |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| I | ≥ 100 % | Sangat Berhasil |
| II | ≥ 90 % < 100 % | Berhasil |
| III | ≥80 % < 90 % | Cukup Berhasil |
| IV | < 80 % | Kurang Berhasil |

3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Tebing Tinggi, yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi pada Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini, berikut analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan dari pencapaian realisasi tersebut.

Tabel 3.2.
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat

| No. | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2022 | Kinerja 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Terhadap Akhir Renstra | Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain | Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi | Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN | Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program) |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial | 105,17% | 83 | 86,85 | 104,64% | 86 | 100,99% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 98,90% |

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023, adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I dan Semester II Tahun 2023. Adapun Realisasi Kinerjanya adalah sebesar 86,85. Rasio Capaiannya sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, baik untuk Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 maupun Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Akhir Rencana Strategis (Renstra) yaitu pada Tahun 2026. Akan tetapi Rasio Capaian untuk Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan Rasio Capaian untuk Tahun 2022.

Selanjutnya untuk Rasio Capaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten/Kota Lain di Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan maupun RPJMN, tidak bisa ditampilkan. Hal ini disebabkan tidak adanya data pembandingan dimaksud.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

| | | | |
|----------------|------|------|--|
| 7.01.02 | | | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| 7.01.02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| 7.01.02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |

Serapan Anggaran dalam rangka mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar

98,90%. Yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 63.960.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 64.674.000,-.

Tabel 3.3.
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

| No. | Indikator Kinerja | Capaian 2022 | Kinerja 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Terhadap Akhir Renstra | Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain | Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi | Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN | Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program) |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | | | | |
| 3 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif | - | 60 | 54 | 90,00% | 60 | 90,00% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 88.69% |

Realisasi Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada Tahun 2023 adalah sebanyak 54 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dari target sebanyak 60 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), atau dengan Rasio Capaian Kinerjanya adalah sebesar 90%. Rasio Capaian ini sama juga terhadap Target Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026. Adapun faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya Rasio Capaian Kinerja tersebut adalah :

1. Tidak selarasnya antara Belanja dan Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Mepetnya waktu untuk melaksanakan Pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif, sebagai akibat dari diterapkannya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Anggaran Perubahan.
3. Belum semua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) teradministrasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa.

Untuk Rasio Capaian terhadap Tahun 2022 dan Kabupaten/Kota Lain di Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan maupun RPJMN, tidak bisa ditampilkan. Hal ini disebabkan tidak adanya data pembanding dimaksud. Adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai konsekwensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

| | | | |
|---------|------|------|--|
| 7.01.03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| 7.01.03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| 7.01.03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| 7.01.03 | 2.06 | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan |
| 7.01.03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |

Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 88,69%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 255.048.500,- dengan Pagu Anggaran Rp. 287.578.000,-.

Tabel 3.4.
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan

| No. | Indikator Kinerja | Capaian 2022 | Kinerja 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Terhadap Akhir Renstra | Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain | Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi | Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN | Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program) |
|-----|--|--------------|--------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | | | | |
| 3 | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | - | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 99,57% |

Realisasi Kinerja Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Rasio Capaian ini sama juga terhadap Target Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026. Adapun faktor yang menyebabkan Rasio Capaian bisa maksimal, adalah :

1. Sudah selarasnya antara Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), walaupun dari sisi Belanja belum

mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud.

2. Harmonisnya jalinan hubungan Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), sehingga setiap ada kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) selalu sinergis dalam melakukan penanganan.

Adapun untuk Rasio Capaian terhadap Tahun 2022 dan Kabupaten/Kota Lain di Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan maupun RPJMN, tidak bisa ditampilkan. Hal ini disebabkan tidak adanya data pembandingan dimaksud. Adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai konsekuensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

| | | | |
|---------|------|------|---|
| 7.01.04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| 7.01.04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 7.01.04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |

Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 99.57%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 45.798.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 45.998.000,-.

Tabel 3.5.
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

| No. | Indikator Kinerja | Capaian 2022 | Kinerja 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Terhadap Akhir Renstra | Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain | Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi | Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN | Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program) |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | | | | |
| 4 | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan | - | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 99.20% |
| 5 | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan | - | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 95.89% |

Realisasi Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Rasio Capaian ini sama juga terhadap Target Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026. Adapun faktor yang menyebabkan maksimalnya pencapaian Target Kinerja adalah, Pemerintahan Desa sudah terbiasa menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini disebabkan kedua laporan tersebut sudah dijadikan syarat untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap II.

Untuk Rasio Capaian terhadap Tahun 2022 dan Kabupaten/Kota Lain di Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan maupun RPJMN, tidak bisa ditampilkan. Hal ini disebabkan tidak adanya data pembanding dimaksud. Adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai konsekuensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

| | | | |
|---------|------|------|--|
| 7.01.05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
| 7.01.05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| 7.01.06 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |

Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 99,20%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 135.080.200,- dengan Pagu Anggaran Rp. 134.004.200,-.

Sedangkan untuk Realisasi Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Rasio Capaian ini sama juga terhadap Target Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026. Adapun faktor yang menyebabkan maksimalnya pencapaian Target Kinerja adalah, Laporan Keuangan Desa baik Triwulan, Semester maupun Tahunan, sudah tersedia pada Aplikasi Siskeudes, yang merupakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Untuk Rasio Capaian terhadap Tahun 2022 dan Kabupaten/Kota Lain di Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan maupun RPJMN, tidak bisa ditampilkan. Hal ini disebabkan tidak adanya data pembanding dimaksud. Adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah sebagai konsekwensi dari disusunnya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Akhir Tahun 2023.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian dari Sasaran Strategis di atas adalah :

| | | | |
|---------|------|------|---|
| 7.01.06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| 7.01.06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 7.01.06 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
| 7.01.06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |

Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 95,89%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 143.328.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 149.472.200,-.

3.1.2. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Kecamatan Tebing Tinggi pada Tahun 2023 yang digunakan untuk mendukung Pencapaian Indikator Kinerja, sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 3.1.3 di atas berjumlah Rp. 400 yang meliputi Belanja Tidak Langsung berjumlah Rp. 3.970.353.200,00 dan Belanja Langsung berjumlah Rp. 140.013.800,00. Sedangkan Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 3.704.109.752,00 atau sekitar 90,12% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.568.783.252,00 (89,89%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 135.326.500,00 (96,65%).

Berikut adalah data perbandingan antara Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.427.564.600 | 3.061.971.052 | 89,33% | 365.593.548 |
| 1 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90.552.500 | 89.084.300 | 98,38% | 1.468.200 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.223.000 | 7.132.900 | 98,75% | 90.100 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.199.500 | 6.119.500 | 98,71% | 80.000 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 77.130.000 | 75.831.900 | 98,32% | 1.298.100 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.581.418.600 | 2.257.545.797 | 87,45% | 323.872.803 |
| 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.530.718.600 | 2.206.905.797 | 87,20% | 323.812.803 |
| 5 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50.700.000 | 50.640.000 | 99,88% | 60.000 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00% | 0 |
| 6 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00% | 0 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|----|---|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 284.040.300 | 204.047.760 | 71,84% | 6.798.505 |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.250.000 | 2.250.000 | 100,00% | 0 |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.335.200 | 4.264.000 | 98,36% | 71.200 |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42.842.600 | 42.723.400 | 99,72% | 119.200 |
| 10 | Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan | 12.082.500 | 11.182.500 | 92,55% | 900.000 |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 222.530.000 | 216.821.895 | 97,43% | 5.708.105 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 130.013.800 | 125.401.500 | 96,45% | 4.612.300 |
| 12 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 74.409.000 | 70.301.500 | 94,48% | 4.107.500 |
| 13 | Pengadaan Mebel | 55.604.800 | 55.100.000 | 99,09% | 504.800 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 174.288.600 | 162.992.649 | 93,52% | 11.295.951 |
| 14 | Penyediaan Surat Menyurat | 72.842.000 | 72.842.000 | 100,00% | 0 |
| 15 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.400.000 | 19.116.049 | 62,88% | 11.283.951 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 16 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 71.046.600 | 71.034.600 | 99,98% | 12.000 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 147.250.800 | 129.705.011 | 88,08% | 17.545.789 |
| 17 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 102.025.800 | 87.917.011 | 86,17% | 14.108.789 |
| 18 | Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya | 6.600.000 | 5.788.000 | 87,70% | 812.000 |
| 19 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 38.625.000 | 36.000.000 | 93,20% | 2.625.000 |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 64.674.000 | 63.960.000 | 98,90% | 714.000 |
| 8 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 64.674.000 | 63.960.000 | 98,90% | 714.000 |
| 20 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 64.674.000 | 63.960.000 | 98,90% | 714.000 |
| III | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 287.578.000 | 255.048.500 | 88,69% | 32.529.500 |
| 9 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 195.674.500 | 184.664.000 | 94,37% | 11.010.500 |
| 21 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 195.674.500 | 184.664.000 | 94,37% | 11.010.500 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|----|---|-------------|-------------|--------|------------------|
| 10 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 91.903.500 | 70.384.500 | 76,59% | 21.519.000 |
| 22 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 91.903.500 | 70.384.500 | 76,59% | 21.519.000 |
| IV | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 45.998.000 | 45.798.000 | 99,57% | 200.000 |
| 11 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 45.998.000 | 45.798.000 | 99,57% | 200.000 |
| 23 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 45.998.000 | 45.798.000 | 99,57% | 200.000 |
| V | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 135.080.200 | 134.004.200 | 99,20% | 1.076.000 |
| 12 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 135.080.200 | 134.004.200 | 99,20% | 1.076.000 |
| 24 | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 135.080.200 | 134.004.200 | 99,20% | 1.076.000 |
| VI | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 149.472.200 | 143.328.000 | 95,89% | 6.144.200 |
| 13 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 149.472.200 | 143.328.000 | 95,89% | 6.144.200 |
| 25 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 73.086.000 | 72.480.000 | 99,17% | 606.000 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 26 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 76.386.200 | 70.848.000 | 92,75% | 5.538.200 |
| TOTAL | | 4.110.367.000 | 3.704.109.752 | 90,12% | 406.257.248 |

3.1.3. Analisis Kinerja Lainnya

Pada Tahun 2023, Kecamatan Tebing Tinggi mengikuti Lomba Inovasi Daerah. Ada 4 (empat) inovasi yang terdaftar. Diinput pada Aplikasi Sistem informasi Inovasi Daerah (SINOVDA) Kabupaten Balangan, yaitu

1. Laporan Raja Pede (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa), dengan Bobot 104
2. Sijari Alde (Sistem Jejaring Andal Layanan Desa), dengan Bobot 102
3. E - Monalisa (Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa), Dengan Bobot 100
4. Tersirat (Tertib Administrasi Surat), dengan Bobot 95

Inovasi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan Inovasi LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa) masuk dalam peserta Finalis TOP 10 Pada Lomba Inovasi Daerah (BAILANG TAHUN 2023). Keberadaan Inovasi LAPOR RAJA PEDE, sangat menunjang pencapaian Indikator Kinerja Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan.

Adapun terkait dengan Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, maka Kecamatan Tebing Tinggi menindaklanjuti hal tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2022

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT |
|----|---|--|
| 01 | Membuat SOP pedoman teknis perencanaan kinerja SKPD | Dokumen SOP perencanaan kinerja sedang disusun dan menunggu penetapannya |
| 02 | Mengunggah dokumen perencanaan kinerja pada website SKPD, website pemkab balangan dan website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website E-AKIP dengan alamat esr.menpan.go.id | dokumen perencanaan kinerja pada website SKPD, website pemkab balangan dan website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website E-AKIP dengan alamat esr.menpan.go.id |
| 03 | Pegawai struktural, fungsional, dan staf menetapkan SKP atau PK yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagai komitmen dalam pencapaian target kinerja | Pegawai struktural, fungsional, dan staf menetapkan SKP atau PK yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagai komitmen dalam pencapaian target kinerja |
| 04 | Monev harus ditandatangani pejabat terkait | akan dilaksanakan untuk penandatanganan monev selanjutnya |
| 05 | Penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LKjIP menjadi Langkah perbaikan yang tertuang di RKPD atau Renja | akan dilaksanakan Penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LKjIP menjadi Langkah perbaikan yang tertuang di RKPD atau Renja |
| 06 | Setiap pegawai membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran | telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran |
| 07 | Membuat SOP Pengumpulan pengukuran kinerja SKPD | akan dibuat SOP Pengumpulan Pengukuran kinerja SKPD |
| 08 | Membuat jadwal kegiatan pengukuran kinerja setiap triwulan | akan di laksanakan Pengukuran kinerja setiap triwulan |
| 09 | Agar SKPD mengusulkan kepada Inspektorat untuk dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) atas Dokumen LKjIP yang telah disusun Th. 2023 | akan mengusulkan supaya di reviu terlebih dahulu oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) atas dokumen LKjIP yang telah disusun Th.2023 |
| 10 | LKjIP memberikan informasi mengenai target yang akan dicapai pada tahun evaluasi pada RPJMD/Renstra, kemudian dibandingkan dengan capaian hasil atau realisasi kinerja pada tahun evaluasi. Realisasi capaian kinerja secara Komulatif dibandingkan juga dengan target akhir/total pada RPJMD dan Renstra | akan kami informasikan mengenai target yang akan di capai pada tahun evaluasi pada RPJMD/Renstra kemudian akan kami bandingkan dengan capaian hasil atau realisasi kinerja secara komulatif dibandingkan juga dengan target akhir/total pada RPJMD dan Renstra |

| NO | REKOMENDASI | TINDAK LANJUT |
|----|---|--|
| 11 | LKjIP memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD/Pemda dengan data realisasi capaian nasional | akan kami buat informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD/pemda dengan data realisasi capaian nasional untuk bahan data selanjutnya |
| 12 | LKjIP memberikan rekomendasi perbaikan atas hambatan yang terjadi | akan kami masukan data rekomendasi perbaikan atas hambatan yang terjadi |
| 13 | LKjIP memberikan informasi target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja yang tertera pada PK seluruh Pegawai | Akan Kami buat informasi target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja yang tertera pada PK seluruh Pegawai untuk bahan selanjutnya |
| 14 | Proses monev dilakukan secara bottom up, sehingga penyesuaian target dan realisasi pada monev sama dari level pegawai bawah hingga atas dan diformalkan | Akan kami lakukan monev secara bottom up untuk penyesuaian target dan realisasi pada monev sama dari level pegawai bawah hingga atas dan di informalkan untuk bahan data selanjutnya |
| 15 | Membuat SOP mengenai pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal | Akan segera di buat SOP mengenai Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal |
| 16 | Informasi pada monev Triwulan harus meliputi target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi | Monev triwulan harus meliputi target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi akan kami masukkan untuk bahan data selanjutnya |

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum Capaian Kinerja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 masuk Kategori Berhasil, hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Rasio Capaian Kinerjanya 100% bahkan ada yang lebih. Walaupun ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk Kategori Kurang Berhasil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023

| No. | Indikator Kinerja | Capaian 2022 | Kinerja 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Terhadap Akhir Renstra | Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain | Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi | Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN | Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program) |
|-----|--|--------------|--------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 105,17% | 83 | 86,85 | 104,64% | 86 | 100,99% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 98,900% |
| 2 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif | - | 60 | 54 | 90,00% | 120 | 45,00% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 86,69% |
| 3 | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani | - | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 99,57% |
| 4 | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan | - | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 99,20% |
| 5 | Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan | - | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 95,89% |

4.2. Upaya Perbaikan

Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk Kategori Kurang Berhasil, yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif, adalah dengan cara lebih mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Desa. Ke depannya Pemerintah Desa akan didorong untuk lebih memperhatikan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), baik dari sisi legalitasnya maupun perannya. Sehingga lebih berperan dalam jalannya roda Pemerintahan Desa.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Capaian Kinerjanya sudah 100% atau bahkan lebih, Kecamatan Tebing Tinggi minimal akan mempertahankan pencapaian tersebut dan berupaya untuk lebih meningkatkan sisi kualitasnya.

Tebing Tinggi, 01 Februari 2024

CAMAT TEBING TINGGI



NORSAMIDI, S.Kep

NIP. 19720606 199202 1 001

LAMPIRAN

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norsamidi, S.Kep
NIP : 19720606 199202 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Camat Tebing Tinggi

Dengan ini menyatakan bahwa, penyebab perbedaan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 dengan apa yang disampaikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, adalah :

1. Terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah Kecamatan dengan narasumber pada saat Pra Evaluasi RB dan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, terkait pemilahan Indikator Kinerja bagi Kepala SKPD dan Kepala Seksi.
2. Tidak memungkinkan lagi waktu, untuk melakukan perbaikan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 Kepala SKPD.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk diketahui dan sebagai bahan selanjutnya.

Tebing Tinggi, 01 Februari 2024

CAMAT TEBING TINGGI,



NORSAMIDI, S.Kep
NIP. 19720606 199202 1 001



SERTIFIKAT

Nomor : 070/1790/Bappedalitbang-Blg/2023

DIBERIKAN KEPADA :

KECAMATAN TEBING TINGGI

DENGAN INOVASI :

**LAPOR RAJA PEDE
(PELAPORAN RANGKAP JABATAN
PERANGKAT DESA)**

Sebagai **Finalis Top 10 Inovasi** dalam Lomba Inovasi Balangan (BAILANG) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan bertempat di Aula 1 Bappedalitbang Kabupaten Balangan pada Hari Senin, 04 September 2023.

Paringin, 04 September 2023
Kepala Bappedalitbang,



H. Rakhmadi Yushi, S.Sos, M.AP
NIP. 19701207 199503 1 002

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

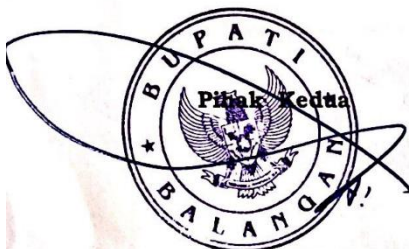
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAHRIANSYAH, S. Pd
Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom
Jabatan : BUPATI BALANGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Paringin, 10 Januari 2023

Pihak Pertama,

PAHRIANSYAH, S. Pd

NIP.19660407 199211 1 001

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap PATEN | 82.30 |
| 2 | Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan | Skor IDM Desa | 0,7200 |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|--------------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Rp.2.938.364.600 | APBD |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Rp. 55.774.000 | APBD |
| 3. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp.227.280.200 | APBD |
| 4. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp.270.578.000 | APBD |
| 5. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp.140.572.200 | APBD |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 40.798.000 | APBD |
| | | Rp. 3.673.367.000 | |



Pihak Kedua

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Paringin, 10 Januari 2023

Pihak Pertama,

PAHRANSYAH, S.Pd
NIP.19660407 199211 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWITA, S. Pd.
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PAHRIANSYAH, S. Pd
Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 31 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

SUWITA, S. Pd.
NIP. 19720626 200701 2 015

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PATEN | Persentase PATEN yang terlayani sesuai Standar | 100% |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|------------------|--|
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Rp. 55.774.000,- | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

SUWITA, S. Pd
NIP. 19720626 200701 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI EFFENDI, S. Pd., MM
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PAHRIANSYAH, S. Pd
Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

FITRI EFFENDI, S. Pd., MM
NIP. 19890510 201503 1 001

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa | Persentase Tertib administrasi Keuangan & Aset Desa | 100% |
| | | | |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|--------------------------|--|
| 1 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Rp. 67.686.000,- | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| | Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | Rp. 72.886.200,- | |
| | Jumlah | Rp. 140.572.200,- | |

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023
Pihak Pertama,

FITRI EFFENDI, S. Pd., MM
NIP. 19890510 201503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUNAIDI, S. Pd.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PAHRIANSYAH, S. Pd
Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

JUNAIDI, S. Pd.
NIP. 19851205 201001 1 013

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Aparatur Kecamatan | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% |
| 2 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan | Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik | 2 |
| 3 | Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan tunjangan dan Penyediaan JasaNon ASN | 15 Orang |
| 4 | Terpenuhinya Bahan Logistik Perkantoran dan Bahan Cetak / Penggandaan di Kecamatan | Persentase pemenuhan pelayanan Logistik perkantoran / umum dan Bahan Cetak / Penggandaan | 100% |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|------------------|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | <i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i> |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 900.000,- | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 4.335.200,- | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. 22.313.300,- | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. 2.362.500,- | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 99.400.000,- | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 23.290.900,- | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Rp. 62.442.000,- | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 24.000.000,- | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 54.914.600,- | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 64.414.150,- | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 6.600.000,- | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. 31.665.000,- | |

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 12.500.000,-

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.434.557.350,-

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 42.200.000,-

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua



PAHRANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,



JUNAIDI, S. Pd
NIP. 19851205 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAJI RASYIDI, S.Ag
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PAHRIANSYAH, S. Pd
Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

HAJI RASYIDI, S. Ag
NIP. 19700102 199803 1 011

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas | Persentase ketercapaian pelayanan umum | 100% |
| | | Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur | 100% |
| | | Persentase pemenuhan pelayanan keuangan | 100% |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|---------------------|--|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 2.938.364.600,- | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

HAJI RASYIDI, S.Ag
NIP. 19700102 199803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAMITRO, S. Sos.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PAHRIANSYAH, S. Pd
Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

HAMITRO, S. Sos.
NIP. 19780715 200604 1 020

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 5 |
| 2 | Meningkatnya Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen laporan Keuangan dan Laporan kinerja yang disusun | 4 |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|-------------------------|--|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 5.770.100,- | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Rp. 5.799.500,- | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. 38.900.000,- | |
| | Jumlah | Rp. 50.469.600,- | |

Tebing Tinggi, 31 Januari 2022

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

HAMITRO, S. Sos.
NIP. 19780715 200604 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL HADI, AMd
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM DAN KOORDINASI
KETENTRAMAN KETERTIBAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PAHRIANSYAH, S. Pd
Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

ABDUL HADI, AMd
NIP. 19820820 200501 1 006

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Koordinasi dan harmonisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Prosentase Koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor | 100% |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|------------------|--|
| 1 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. | Rp. 40.798.000,- | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

ABDUL HADI, AMd
NIP. 19820820 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISNADI, S. Pd.
Jabatan : KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PAHRIANSYAH, S. Pd
Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

MISNADI, S. Pd.
NIP. 19830420 200604 1 010

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|--------------------------|---|
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal | Rp. 227.280.200,- | <i>Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum</i> |

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

MISNADJ, S. Pd
NIP. 19830420 200604 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMARIADI, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PAHRIANSYAH, S. Pd
Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

PAHRIANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Pihak Pertama,

SUMARIADI, SE
NIP. 19770924 201001 1 007

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas Kegiatan Pemberdayaan Desa diwilayah Kecamatan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa diwilayah Kecamatan | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas. | Persentase Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas. | 100% |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|---|--------------------------|--|
| 1 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayan Masyarakat diwilayah Kecamatan. | Rp. 183.374.500,- | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Penumbuhan dan peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas. | Rp. 87.203.500,- | |
| | Jumlah | Rp. 270.578.000,- | |

Pihak Kedua



PAHRANSYAH, S. Pd
NIP. 19660407 199211 1 001

Tebing Tinggi, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,



SUMARIADI, SE
NIP. 19770928 201001 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN TEBING TINGGI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.MUKHLIS
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HAMITRO, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

HAMITRO, S.Sos
Penata Muda Tk.I
NIP. 19780715 200604 1 020

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023

Pihak Pertama,

M.MUKHLIS
Pengatur
NIP. 19770210 201212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|--|---------------|--------|
| 1 | Tersedianya data kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan mendokumentasikan dokumen administrasi keuangan | Jumlah bahan penerimaan dan pencatatan dokumen administrasi keuangan | Bahan Laporan | 40 |
| | | Jumlah bahan Menginventarisir dokumen administrasi keuangan | Bahan Laporan | 40 |
| | | Jumlah bahan mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya | Bahan Laporan | 30 |
| | | Jumlah bahan mendokumentasikan dokumen administrasi keuangan | Bahan Laporan | 30 |
| | | Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban | Bahan Laporan | 30 |

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023
 Pengadministrasi Keuangan,

Kepala Sub Bagian Perencanaan
 Dah Keuangan,



HAMITRO, S.Sos
 Penata Muda Tk.I
 NIP. 19780715 200604 1 020



M. MUKHLIS
 Pengatur
 NIP. 19770210 201212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN TEBING TINGGI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMADNOR FITRI, S.I.P
Jabatan : Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MISNADI, S.Pd
Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MISNADI, S.Pd
Penata
NIP. 19830420 200604 1 010

MUHAMMADNOR FITRI, S.I.P
Penata Muda
NIP. 19960302 202012 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH PADA
SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|---|---------------|--------|
| 1 | Tersedianya data yang meliputi penerimaan, pencatatan dan mendokumentasikan dokumen administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku | Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pelaksanaan Kerja sama Desa | Bahan Laporan | 12 |
| | | Jumlah Laporan Bulanan Kependudukan (laporan RT) | Bahan Laporan | 144 |
| | | Jumlah Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah Laporan Peraturan Perundangan yang dianalisis | Bahan Laporan | 10 |

Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan,

MISNADI, S.Pd

Penata

NIP. 19830420 200604 1 010

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023

Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

MUHAMMADNOR FITRI, S.I.P

Penata Muda

NIP. 19960302 202012 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN TEBING TINGGI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHRUDIN
Jabatan : Pramu Bakti
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUNAIDI, S.Pd
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


JUNAIIDI, S.Pd
Penata Tk.I
NIP. 19851205 201001 1 013


SYAHRUDIN
Juru Tk.I
NIP. 19750121 201001 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PRAMU BAKTI
PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|---|---------------|--------|
| 1 | Tersedianya pelaksanaan perawatan dan penyimpanan peralatan yang akan digunakan sesuai prosedur agar tidak cepat rusak | Jumlah bahan laporan pelaksanaan perawatan mesin dan peralatan | Bahan Laporan | 20 |
| | | Jumlah bahan laporan pemeliharaan kebersihan Peralatan sebelum dan sesudah dipakai | Bahan Laporan | 20 |
| | | Jumlah bahan laporan tugas/ perbaikan dan melaporkan hasil pelaksanaan/perbaikan pada atasan agar ditindak lanjuti. | Bahan Laporan | 20 |
| | | Jumlah laporan pelaksanaan kelengkapan peralatan kantor dan fasilitas kantor yang dirawat | Bahan Laporan | 20 |

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian,


JUNAIDI, S.Pd
 Penata Tk.I
 NIP. 19851205/201001 1 013

Pramu Bakti,


SYAHRUDIN
 Juru Tk.I
 NIP. 19750121 201001 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN TEBING TINGGI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMADI
Jabatan : Pengadministrasi Perizinan
Selanjutnya disebut pihak pertama

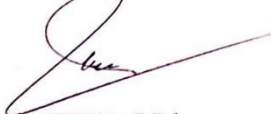
Nama : SUWITA, S.Pd
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Publik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


SUWITA, S.Pd
Penata
NIP. 19720626 200701 2 015

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023

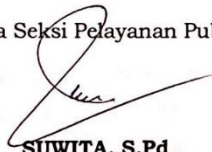
Pihak Pertama,


RAHMADI
Pengatur Tk.I
NIP. 19700718 200906 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI PERIZINAN PADA
SEKSI PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--|---------------|--------|
| 1 | Tersedianya data kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan mendokumentasikan administrasi perijinan | Jumlah menerima dan mencatat dan menyortir dokumen perijinan | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah bahan mengelompokkan surat menurut jenis dan sifatnya | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah bahan dokumen perijinan yang telah diverifikasi | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah bahan dokumentasi dokumen sesuai dengan prosedur | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah bahan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku | Bahan Laporan | 30 |

Kepala Seksi Pelayanan Publik,



SUWITA, S.Pd

Penata

NIP. 19720626 200701 2 015

Awayan, 11 Januari 2023

Pengadministrasi Perizinan,



RAHMADI

Pengatur Tk.I

NIP. 19700718 200906 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN TEBING TINGGI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

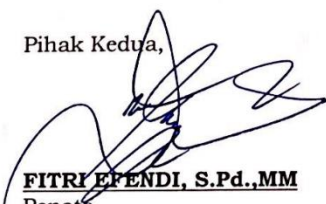
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : SUHAEDY
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FITRI EFENDI, S.Pd.,MM
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FITRI EFENDI, S.Pd.,MM
Penata
NIP. 19890510 201503 1 013

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023
Pihak/Pertama,

SUHAEDY
Pengatur Tk.I
NIP. 19780811 200701 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM PADA
SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN


| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|---|---------------|--------|
| 1 | Tersedianya Data Pengadministrasi Umum pada kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah data menerima, mencatat dan menyortir surat masuk sesuai dengan prosedur | Bahan Laporan | 20 |
| | | Jumlah bahan konsep menerima, mencatat surat masuk sesuai prosedur yang berlaku | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah bahan memberi lembar pengantar pada surat sesuai dengan prosedur | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah bahan laporan Dokumentasi sesuai dengan prosedur | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku | Bahan Laporan | 30 |

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023

Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa,

Pengadministrasi Umum,


FITRI EFENDI, S.Pd.,MM
 Penata
 NIP. 19890510 201503 1 013


SUHAEDY
 Pengatur Tk.I
 NIP. 19780811 200701 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN TEBING TINGGI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARMUNI
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUNAIDI, S.Pd
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,

JUNAJDI, S.Pd
Penata Tk.I
NIP. 19851205 201001 1 013

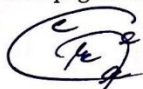
Pihak Pertama,

ARMUNI
Pengatur
NIP. 19721221 200906 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM PADA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|---|---------------|--------|
| 1 | Tersedianya Data kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi | Jumlah Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk sesuai dengan prosedur | Bahan Laporan | 20 |
| | | Jumlah bahan konsep menerima, mencatat surat masuk sesuai prosedur yang berlaku | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah bahan memberi lembar pengantar pada surat sesuai dengan prosedur | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah bahan laporan Dokumentasi sesuai dengan prosedur | Bahan Laporan | 10 |
| | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku | Bahan Laporan | 30 |

Kepala Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian,



JUNAIDI, S.Pd
Penata Tk.I
NIP. 19851205 201001 1 013

Tebing Tinggi, 11 Januari 2023
Pengadministrasi Umum,



ARMUNI
Pengatur Muda
NIP. 19721221 200906 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURSAMIDI, S.Kep
Jabatan : CAMAT TEBING TINGGI
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom
Jabatan : BUPATI BALANGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,

NORSAMIDI, S.Kep

NIP.19720606 199202 1 001

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN TEBING TINGGI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

KECAMATAN TEBING TINGGI

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET SEBELUM PERUBAHAN | TARGET SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH ATAU BERKURANG |
|-----|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik | Nilai IKM | 82.30 | 82.30 | |

| No | Program | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Keterangan |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Rp.2.938.364.600 | Rp.3.427.564.600 | APBD |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Rp.55.774.000 | Rp.64.674.000 | APBD |
| 3. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp.227.280.200 | Rp.135.080.200 | APBD |
| 4. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp.270.578.000 | Rp.287.578.000 | APBD |
| 5. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp.140.572.200 | Rp.149.472.200 | APBD |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp.40.798.000 | Rp. 45.998.000 | APBD |
| Jumlah | | Rp.3.673.367.000 | Rp. 4.110.367.000 | |

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

NORSAMIDI, S.Kep
NIP.19720606 199202 1 001